

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi saat ini, kenaikan pertumbuhan suatu penduduk dalam sebuah negara berkembang berdampak pada pesatnya peningkatan angka kemiskinan. Angka tingginya tingkatan pertumbuhan penduduk maupun kurangnya keseimbangan dalam struktur usia penduduk dalam beberapa daerah menjadi suatu fenomena khusus yang perlu diperhatikan, terutama di negara Indonesia (Abdurrahman, Rachman, M., & Ayu, 2019). Permasalahan sosial yang senantiasa terlihat di tengah-tengah penduduk, tidak terkecuali di negara-negara berkembang ialah kemiskinan (Heryanti, 2019). Kemiskinan ialah permasalahan yang cukup rumit, yang disebabkan oleh beragam aspek, seperti contohnya faktor pendapatan, pendidikan, wilayah, gender, maupun kondisi lingkungan.

Ciri-ciri kemiskinan di Indonesia ialah jumlah yang banyak pada rumah tangga yang berada pada posisi sekitar garis kemiskinan. Dampaknya, walaupun tidak termasuk golongan miskin, masyarakat mudah rentan pada kemiskinan. Kemiskinan ialah salah satu fenomena yang selalu dihadapkan dengan manusia, maknanya, permasalahan kemiskinan telah menjadi fokus perhatian seluruh dunia, serta masalah itu hadir di seluruh negara, khususnya di Indonesia. Akibat dari kemiskinan itu juga beragam serta menjadi permasalahan sosial yang harus dicegah dan diatasi dengan serius (Mulyati, Caesar & Purnama, 2022).

Indonesia ialah salah satu negara terpadat di dunia, menduduki posisi ke empat sesudah Amerika Serikat dengan jumlah penduduk yaitu mencapai 275 juta jiwa (Akram, 2022). Dengan jumlah tersebut, maka tidak sedikit pula kerentanan masyarakat Indonesia terhadap kemiskinan, sehingga sangat

dibutuhkan suatu pembangunan yang meningkat guna mendukung penduduknya meraih kesejahteraan.

Disebutkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, suatu tujuan dari pembangunan nasional itu akan hendak terlaksana sekiranya masyarakat maupun pemerintah bisa sama-sama berkontribusi di dalam proses pembangunan, tercantum di aspek kesejahteraan sosial. Dalam perkara itu, yang cukup fundamental pada aspek kesejahteraan sosial dimana dalam kasus kemiskinan, yang mana nyaris pada setiap daerah angka kemiskinan meninggi disebabkan oleh faktor keuangan (Heryanti, 2019). Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai pegangan dalam menghasilkan keadilan, ketenteraman, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran dan kontribusi negeri untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat yang baik. Tidak hanya itu, pembangunan nasional memiliki tujuan dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh dalam bentuk material maupun spiritual, dan melaksanakan rangkaian perekonomian untuk menghasilkan ketenteraman sosial (Abdurrahman, Rachman, M., & Ayu, 2019).

Terbentuknya masyarakat yang adil serta makmur menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program dari pembangunan yang hendak dilakukan dalam waktu tertentu bisa memberi kepedulian yang besar dalam usaha mengentaskan kemiskinan, karena pada dasarnya suatu pembangunan yang dilaksanakan memiliki tujuan dalam menaikkan tingkat kemakmuran masyarakatnya. Salah satu hambatan dalam laju pertumbuhan manusia ialah persoalan kemiskinan. Kemiskinan kerap kali menjadi penghambat untuk penduduk dalam menjangkau kesehatan serta pendidikan. Berbagai penyebab kemiskinan ialah beragam aspek yang saling berhubungan satu sama lain. Maka dari itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan tindakan yang mewakili bermacam-macam aspek yang berhubungan (Jabar, 2021).

Penanggulangan untuk masalah kemiskinan tertuang dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan yang mana menginstruksikan kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah dalam memilih langkah-langkah yang dibutuhkan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan. Selain itu, permasalahan kemiskinan diatur juga dalam Pergub Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan ini sebagai pedoman dalam menjalankan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan. Hal ini juga tercantum dalam Keputusan Bupati Kuningan Nomor 460/KPTS.70.BAPENDA/2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2021. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah memiliki tugas melaksanakan koordinasi serta mengawasi penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang ini mengatur tentang hak fakir miskin untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah memastikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Hal ini ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengatur tentang pelaksanaan kesejahteraan sosial dengan mencakup pemberian bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Undang-undang ini menjadi dasar bagi berbagai program Kementerian Sosial dalam menanggulangi

kemiskinan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan fokus pada kelompok rentan dan miskin.

Selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mengatur tentang koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Juga membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang dan Peraturan tersebut memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, serta mendukung pelaksanaan berbagai program dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah.

Kabupaten Kuningan ialah pemerintahan daerah yang hadir di Provinsi Jawa Barat yang mencakup dari 32 kecamatan, 15 kelurahan dan 361 desa. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mengalami fase naik turun di tiap tahunnya. Berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat, dengan tingkat kemiskinan yang cenderung menurun dan presentase yang kecil. Meskipun Kuningan tidak termasuk dalam wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat, kemiskinan tetap menjadi isu yang signifikan, terutama di wilayah pedesaan. Data menunjukan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Kuningan tinggal didesa-desa terpencil, dimana akses ke layanan publik dan infrastruktur masih terbatas.

Penyebab utama kemiskinan di Kabupaten Kuningan meliputi keterbatas akses terhadap pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan lapangan kerja yang layak. Selain itu, kuranganya diversifikasi ekonomi dan ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian yang rentan juga berkontribusi terhadap kemiskinan.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan melaksanakan berbagai program seperti Program

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha. Selain itu, PemDa Kabupaten Kuningan memiliki program GEMA SADULUR dalam upayanya menanggulangi kemiskinan. Program ini merupakan sebuah gerakan yang lahir dari semangat bersama untuk ngariksa kaum dhuafa, lansia dan rekan-rekan lainnya yang belum mendapatkan pekerjaan. Dimana gerakan ini bertujuan untuk menyatukan berbagai upaya PemKab Kuningan agar lebih terkoordinasi menjangkau sasaran yang lebih luas dan mampu menghasilkan kegiatan yang berkesinambungan.

Adapun kegiatan yang merupakan bagian dari Program pemda kabupaten kuningan adalah Gema Sadulur dilaksanakan di 5 Desa dan Kecamatan yang merupakan lokus penanganan kemiskinan ekstrem. Kegiatannya yaitu yang bersifat bantuan atau pemberdayaan masyarakat dari Dinas Sosial (Bantuan alat bantu untuk disabilitas di Desa Kalimanggis Wetan dan Desa Jatimulya Kec. Cidahu), Dinas Perikanan dan Peternakan (Bantuan Ternak ke Desa Margamukti Kecamatan Cimahi), kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan (Gerakan Pangan Murah di Desa Jatimulya Kec. Cidahu dan Pemberdayaan Kelompok Tani Desa Sukaharja Kec. Cibingbin dan Desa Margamukti Kec. Cimahi), Disnakertrans (Job Fair Desa Jatimulya Kec. Cidahu dan Pelatihan Perakitan Furniture Desa Sukaharja Kec. Cibingbin), Dinas Lingkungan Hidup (Pemanfaatan Limbah dan Pembentukan Bank Sampah Desa Margamukti Kec. Cimahi dan Desa Kalimanggis Wetan). Diharapkan dengan cara tersebut kemiskinan di 5 Desa dapat berkurang.

Strategi yang dipakai untuk meraih tujuan mempunyai ciri-ciri, mempunyai unsur-unsur tertentu serta dengan kehadiran strategi diharapkan bisa memberikan keefektifan maupun keefisienan terhadap hal yang akan diraih. Strategi Pemerintah yang dikemukakan oleh (Mulgan, 2009) yang menyatakan bahwa *“public strategy is the systematic use of public resources*

*and powers, by public agencies, to achieves public goods".* Pada intinya, strategi yang diterapkan oleh organisasi pemerintah sebagai perancang kebijakan bertujuan mengatur kekuasaan dan sumber daya melalui lembaga publik, dengan tujuan akhir untuk kepentingan masyarakat umum. Strategi pemerintahan menurut Geoff Mulgan (2009) perlu dilaksanakan melewati proses *purposes* (tujuan), *environment* (lingkungan), *directions* (pengarahan), *actions* (tindakan), dan *learnings* (belajar) supaya terwujudnya seni maupun pengetahuan yang memiliki manfaat baik untuk organisasi ketika meraih tujuannya. Berdasarkan fenomena di atas, maka dengan ini peneliti tertarik memilih judul penelitian **“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Dinas Sosial Kabupaten Kuningan”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Dinas Sosial ditinjau dari segi *purposes* (tujuan) di Kabupaten Kuningan?;
2. Bagaimana strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Dinas Sosial ditinjau dari segi *environment* (lingkungan) di Kabupaten Kuningan?;
3. Bagaimana strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Dinas Sosial ditinjau dari segi *directions* (pengarah) di Kabupaten Kuningan?;
4. Bagaimana strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Dinas Sosial ditinjau dari segi *actions* (tindakan) di Kabupaten Kuningan?;
5. Bagaimana strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Dinas Sosial ditinjau dari segi *learnings* (pembelajaran) di Kabupaten Kuningan?.

### C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah penelitian yang sudah dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti memiliki maksud dan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan meninjau strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Dinas Sosial ditinjau dari segi *purposes* (tujuan) di Kabupaten Kuningan;
2. Untuk mengetahui dan meninjau strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Dinas Sosial ditinjau dari segi *environment* (lingkungan) di Kabupaten Kuningan;
3. Untuk mengetahui dan meninjau strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Dinas Sosial ditinjau dari segi *directions* (pengarah) di Kabupaten Kuningan;
4. Untuk mengetahui dan meninjau strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Dinas Sosial ditinjau dari segi *actions* (tindakan) di Kabupaten Kuningan;
5. Untuk mengetahui dan meninjau strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Dinas Sosial ditinjau dari segi *learnings* (pembelajaran) di Kabupaten Kuningan.

### D. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membaca penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yakni manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berbagi ilmu pengetahuan serta dimanfaatkan sebagai bahan informasi mengenai strategi kebijakan pemerintahan daerah melalui Dinas Sosial untuk mngatasi kemiskinan

secara umum, khususnya melalui Pusat Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kuningan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan sumber referensi dan dapat menjadi alat perbandingan dalam melaksanakan penelitian yang sejenis mengenai strategi kebijakan pemerintahan daerah melalui Dinas Sosial untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

### b. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian dan acuan bagi intansi yang bersangkutan terhadap strategi kebijakan pemerintahan daerah melalui Dinas Sosial untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

### c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, besar harapan penelitian ini dapat menyediakan informasi mengenai pelayanan Dinas Sosial untuk penanggulangan kemiskinan.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran memuat penjelasan dari strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara umum, khususnya pada Dinas Sosial di Kabupaten Kuningan. bertujuan dalam mempermudah untuk peneliti maupun pembaca dari penelitian ini ketika mencerna dan mengetahui tujuan yang akan diraih dalam penelitian. Berkaitan dengan kebijakan strategi, terdapat beberapa teori yang berhubungan, ialah diantaranya teori administrasi publik, manajemen publik dan strategi pemerintahan.

Administrasi sangat berperan penting, karena dapat memutuskan ke dalam beragam hal, contohnya fungsi melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan, dapat berjalan lebih cepat ketika menjalankan tugas, sehingga mempermudah kelancaran, bahkan penting di dalam kehidupan umum. Administrasi Publik dijelaskan oleh Henry dalam (Pasolong, 2017) ialah sebuah kolaborasi yang kompleks diantara teori serta praktik, yang bertujuan mengenalkan pemahaman kepada pemerintah di dalam hubungannya dengan masyarakat, serta mendukung suatu kebijakan publik supaya lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Shafritz dan Russel mengartikan Manajemen Publik sebagai usaha individu dalam bertanggung jawab ketika melaksanakan sebuah organisasi, serta pemanfaatan sumber daya untuk mewujudkan tujuan dari organisasi itu. Manajemen publik lebih memfokuskan kepada pemanfaatan fungsi-fungsi manajemen di dalam jiwa pemerintah sebagai usaha menelusuri strategi guna menciptakan kebijakan publik yang baik. Manajemen publik ialah turunan ilmu dari administrasi publik yang dengan fokus meninjau keilmuan tentang rancangan suatu program serta penataan kembali organisasi, penempatan sumber daya melalui sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, serta evaluasi program dan audit. Manajemen publik berkonsentrasi pada aspek internal organisasi sektor publik, yaitu cara mengelola agar organisasi sektor publik beroperasi secara optimal untuk mencapai tujuannya (Wijaya, Danar, 2014).

Sedangkan, strategi menurut Alfred Chandler ialah penetuan target beserta tujuan dalam jangka yang panjang sebuah perusahaan maupun organisasi juga pengalokasian sumber daya untuk mewujudkan tujuan tersebut (Santoso, Yulyana & Aryani, 2022). Adapun Strategi Pemerintah yang dikemukakan oleh (Mulgan, 2009) yang menyatakan bahwa “*public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*”. Pada intinya, strategi yang diterapkan oleh organisasi pemerintah sebagai perancang kebijakan bertujuan mengatur kekuasaan dan

sumber daya melalui lembaga publik, dengan tujuan akhir untuk kepentingan masyarakat umum.

Adapun komponen strategi pemerintahan menurut Geoff Mulgan (2009) dalam (Muhammad, 2012) perlu dilaksanakan melewati proses *purposes* (tujuan), *environment* (lingkungan), *directions* (pengarahan), *actions* (tindakan), dan *learnings* (belajar) supaya terwujudnya seni maupun pengetahuan yang memiliki manfaat baik untuk organisasi ketika meraih tujuannya. Untuk mewujudkan sebuah tujuan, strategi sangat dibutuhkan. Strategi yang dipakai untuk meraih tujuan mempunyai ciri-ciri, mempunyai unsur-unsur tertentu serta dengan kehadiran strategi diharapkan bisa memberikan keefektifan maupun keefisienan terhadap hal yang akan diraih.





Diolah Peneliti, 2024  
**Gambar 1. 1 Tabel Penelitian**